

**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH MASYARAKAT**  
**PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta**  
**dan Kota Sukoharjo)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**YURISVIA PREVILEGA HATINURAYA**  
**C100100004**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2017**

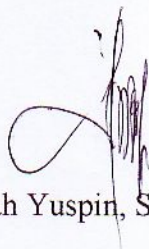
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH MASYARAKAT  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta  
dan Kota Sukoharjo)**

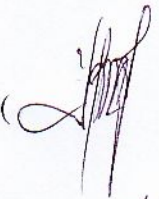


Oleh:

**YURISVIA PREVILEGA HATINURAYA**  
**C100100004**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 7 Agustus 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurisvia Previlega Hatinuraya

NIM : C100100004


Alamat : Perumahan Puri Lestari Dompilan Sidorejo Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 12 Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



Yurisvia Previlega Hatinuraya  
C100100004

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”*

(Qs. Al-Insyiroh ayat 6-8)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
2. Suami dan anakku tercinta.
3. Mertuaku tersayang.
4. Adikku tersayang dan seluruh keluarga, teman-teman serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan doa.
5. Almamater.

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH MASYARAKAT  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta  
dan Kota Sukoharjo)**

Yurisvia Previlega Hatinuraya  
C100100004  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email: [yurisvia@gmail.com](mailto:yurisvia@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, peradilan umum juga mempunyai kewenangan dalam menangani kasus tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang ini menjadi tidak harmonis karena terdapat dualisme kewenangan. Hal ini menimbulkan polemik di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui alur memasukkan perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam hal ini mengenai sengketa perekonomian syariah, dan (2) Untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memasukkan perkara sengketa perekonomian syariah, lebih banyak di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, namun pada kenyataannya masih ada anggapan masyarakat yang menganggap Pengadilan Negeri lebih berkompeten/mampu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui hukum acara perdata.

Kata kunci : Sengketa, ekonomi syariah

## **ABSTRAK**

Religion Court have been given authority to finish the problem of Moslem law of economic dispute specified of Law Number 3 Year 2006 about Religion Court. However, general court also have authority in handling the case, pursuant to Law Number 21 Year 2008 about Moslem law of Banking. Both of this harmonious law becoming not because there are dualism authority. This matter generate polemic in Religion Court and General Court environment. Target of which wish to be reached in this research is: (1) To know include path case in District Court and Religion Court in this case regarding dispute Moslem law of economics, and (2) To know tendency of society in including case of dispute Moslem law of economics, more than in District Court or Religion Court after existence of Law Number 3 Year 2006. This research represent of law of normatif research have definition which is equal to research of doctrinal (doctrinal research) that is research pursuant to law materialss (library based) which its focus at reading and studying materialss punished of primary and secondary. Approach method which is utilized in this research is to use approach of descriptive analysis. This research yield that Religion Court more is entitled to finish Moslem law of economic dispute case, but practically society ascription there is still assuming District Court more have competence / can to finished Moslem law of economic dispute to through of civil procedure law.

Keyword: Dispute, Moslem law of Economic.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyanyang pemilik dan penguasa alam beserta isinya. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH MASYARAKAT PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta dan Kota Sukoharjo)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum dan sarjana syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Ibu Wardah Yuspin, M.H., M.Kn., Ph.D, selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini.
4. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Kepala perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
8. Ayah, Ibu dan Mertua yang telah memberikan do'a, dukungan, nasehat serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Suami, anak, adikku dan keluarga besarku yang telah memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih segalanya.
10. Sahabat-sahabatku Ayu Wardhani, SH, Yuli Astuti, S.Pd, Laili, S.Pd, Via (semangat ya menuju S.Pd), Mba Linda (semangat ya menuju profesinya), Linda (semoga cepet pendadaran) dan teman-teman Kost Griya Warna dan Kos Wisma Asri serta kawan seperjuangan (Ajeng Wiratih, S.H., Serviana, S.H., Reta H, S.H., dan Inna, S.H., dan teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan semangat dalam mengejar cita-cita.

11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 12 Juli 2017

Penulis



(Yurisvia Previllea Hatinuraya)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
 BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Skripsi .....	22
 BAB II LANDASAN TEORI .....	24
A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama di Indonesia .....	24
B. Pengertian Kewenangan Pengadilan Agama .....	25
C. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri ....	26
D. Pengertian Ekonomi Syari'ah .....	31
E. Sistem Ekonomi Syari'ah .....	33
F. Macam-macam Aktivitas Ekonomi Syari'ah .....	34
G. Teori Kewenangan Mengadili .....	42
H. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah .....	43
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Hasil Penelitian .....	49
1. Alur Memasukkan Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah .....	49
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kota Surakarta dan Sukoharjo .....	73

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah oleh Masyarakat Pasca Berlakunya UU No.3 Tahun 2006 ....	96
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	106
1. Alur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kota Surakarta dan Sukoharjo .....	106
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Surakarta dan Sukoharjo oleh Masyarakat Pasca Berlakunya UU No.3 Tahun 2006 .....	109
BAB IV PENUTUP .....	134
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	138

#### DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah .....	4

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Grafik Jumlah Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri .....	5
Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran .....	12